



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO YUDO PRAMONO
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT TRANSMISI SUMATERA, JAWA, MADURA, DAN BALI
3. NHK : 199232

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/142 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m²/335 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 5.150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/190 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.437.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. MOBIL, TOYOTA SEDAN/CAMRY Tahun 2021, LAINNYA Rp. 600.000.000
5. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN/E300 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 206.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.760.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	18.854.000.000
III. HUTANG	Rp.	215.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	18.639.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.